

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Isu Strategis	2
	1.3 Dasar Hukum.....	5
	1.4 Sistematika Laporan.....	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
	B. Struktur Organisasi.....	12
	C. Data Pegawai.....	13
	D. Perjanjian Kinerja	14
	E. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	22
	B. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV	PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV.....	13
Tabel 2.2 Staf/Pelaksana.....	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2021 ...	16
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama	18
Tabel 2.5 Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Indikator Dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021	17
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumobito Tahun 2021	23
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Kecamatan Sumobito Tahun 2021	25
Tabel 3.3 Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021	26
Tabel 3.4 Analisis Pencapaian IKUTahun 2019, 2021 dan 2021...	29
Tabel 3.5 Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja Tahun 2019, 2021 dan 2021	31
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Pada Dokumen Renstra	33
Tabel 3.7 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Kecamatan Sumobito Tahun 2021	35
Tabel 4.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 3.9 Program, Kegiatan, Anggaran Outcome/Output Yang Dihasilkan.....	43
Tabel 3. Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Sumobito Tahun 2021	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Sumobito sebagai organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsidi dari system Pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Sumobito, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan

berdasarkan visi dan misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Sumobito diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Isu Strategis

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Sumobito Tahun 2018 - 2023 yakni:

1. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada standart operasioan prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut

diperlukan standart pelayanan yang secara normative dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan public.

2. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Dengan keluarnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka salah satu fungsi Kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh Kecamatan bersama *stakeholders* lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat undang – undang tersebut.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excellent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standart pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam rangka perwujudan *good governance*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja aparatur sebagai “*pelayanan masyarakat*”.

Sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan menekankan kepada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Sumobito juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan Dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *good governance* di kecamatan. Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Value For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula dengan manajemen barang daerah, dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Sumobito menjadikan kebutuhan Kecamatan Sumobito belum bisa terakomodasi seluruhnya;

2. Fasilitasi penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang.
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Sumobitomasih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Sumobito Tahun 2017 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014

- tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah kabupaten / kota;
 8. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1213);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Jombang tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 07 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2019 Nomor 1/E);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Jombang No.52 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 59/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 59/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

1.4. Sistematika Laporan

Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 disusun dengan sistematika, sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja pada Tahun 2021 yang meliputi penyajian: Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Data Pegawai, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

A. Matriks Renstra

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja

D. Rencana Aksi

E. Monitoring Rencana Aksi

F. Lampiran Lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 dijabarkan sebagai berikut :

1. Camat

Kantor Kecamatan Sumobito dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan Kebijakan teknis Sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas Sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum Pemerintahan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum;
- Pembinaan dan pengoordinasian wilayah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan evaluasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris dibantu oleh :

- a. Sub bagian Umum dan kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Keuangan, penyusunan program dan evaluasi
- Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

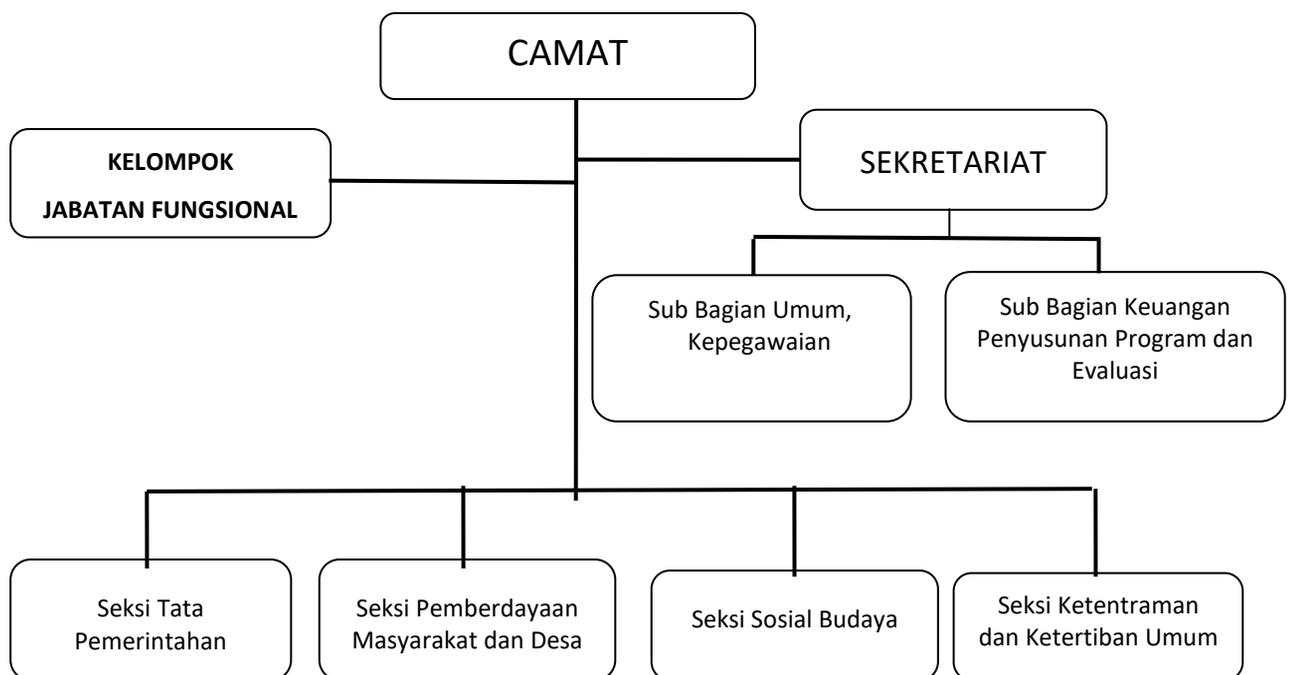
B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahi;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi ketentraman dan ketertiban Umum
- g. kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Sumobito tersaji sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Sumobito



C. DATA PEGAWAI

Rincian personil pegawai kantor Kecamatan Sumoboito, mulai dari Jabatan eselon III dan IV, serta staf pada kantor kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang per bulan Januari 2021 adalah sebagaimana tersaji dalam beberapa tabel berikut :

Tabel 2.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Mustagfirin,AP	197404031993111001	Camat Sumobito
2	Andi Purwanto, S.Psi., MM	197003251992031005	Sekcam Sumobito
3	Samsul Huda	197911042003122004	Kasi PMD
4	Haris Andayani	196502061986031012	Kasi Tata Pemerintahan
5	Kristin Ningrum,ST	196811021991112001	Kasi Sosial Budaya
6	Supandji S.Pi	196611181990031006	Kasi Trantibum.
7	Moh.Shofuan Isdianto,S.Sos	196408271993021001	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian.
8	Dwindra Setyo Nugroho, S.I.P	198203102009012010	Kasubbag Keuangan, Penyusunan program dan Evaluasi.

Tabel 2.2
Staf/Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Trirahmatiningsih S.Pd	197010251999031004	Staf
2	Hadi Prayitno	197205022009061002	Staf
3	Hariono	197010251999031004	Staf
4	Supa'at	196611181990031006	Staf
5	Agus Fakhrudin	196811082007011028	Staf
7	Ahmad Mansyur	196811082007011007	Staf
8	Akhuwat Mu'Minin	197007182007011011	Staf
9	Kristiawati	1973102002009012001	Staf
10	Sofianto	-	Staf

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Sumobito atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sumobito Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Sumobito untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN SUMOBITO TAHUN 2021

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Program	Indikator Program	Anggaran	
							Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Sumobito	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	70,01	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	Rp. 4.657.540.456	Rp. 4.929.898.703
		IKM Kecamatan Sumobito	Nilai	80,00	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN	Rp. 29,909,700	Rp. 29,909,700
		IPP Kecamatan Sumobito	Nilai	3,29	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA yang dilaksanakan	Rp. 22.554.700	Rp. 18.054.700
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	%	100	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	Rp. 9.293.400	Rp. 9.293.400

		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	%	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggung jawaban Realisasi APBDesa	Rp. 11.141.250	Rp. 9.841.250
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desea/Perubahan APB Desa tepat waktu	%	100	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	Rp. 33.340.950	Rp. 33.340.950
			%	100		Persentase Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif		

E. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Sumobito dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Rumus Penghitungan/ Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Sumobito	Nilai SAKIP	Nilai Sinergitas Kec.Sumobito Tahun - n	Hasil Evaluasi SAKIP	Camat Sumobito
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey IKM	Hasil Survey IKM	Camat Sumobito.
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Nilai Survey IPP	Hasil Survey IPP	Camat Sumobito.
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum ----- x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yg ditindaklanjuti	Hasil Perhitungan Laporan	Camat Sumobito.

		Persentase pertanggung jawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa ----- x100% Jumlah Laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa tepat waktu	Hasil Perhitungan Laporan	Camat Sumobito.
		Persentase evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Jumlah laporan evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa ----- x100% Jumlah Laporan evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	Hasil Perhitungan Laporan	Camat Sumobito.

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut telah dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan Kecamatan Sumobito, yaitu :

Tabel 2.5
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub
Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----- x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n

	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Sumobito yang	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Sumobito yang di fasilitasi tahun n

			difasilitasi		
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	2 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	3 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	4 buku	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
		2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	8932 lembar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan

	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 gedung	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya tahun n
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	11 unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n

			listrik yang terfasilitasi		
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

			lapangan yang dibayarkan pajaknya.		dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara	1 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	62,5	Nilai PATEN Kecamatan Sumobito Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)

	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan adminduk yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi ----- x100% Jumlah pengajuan perizinan
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA ----- x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
	Sub Kegiatan Fasilitasi,	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan	Jumlah kegiatan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang

Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	(Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	PHBN/PHBA yang dilaksanakan		dilaksanakan tahun n
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait ----- x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan

	Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan		tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes ----- x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan	42 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n

	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan APB Desa		
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi ----- x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n

	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	42 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	42 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	42 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	21 BUMDes	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n

			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	21 TP-PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n
--	--	--	---------------------------------------	-----------	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Sumobito sebagai OPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator Kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja Sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut;

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 85 s/d 100	: Memuaskan
A	> 75 s/d 85	: Sangat Baik
B	> 65 s/d 75	: Baik

CC	> 50 s/d 65	: Cukup Baik
C	> 30 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 30	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Sumobito memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 – 2023 serta Renja Perubahan 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja kecamatan Sumobito diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sehubungan hal tersebut, pada tahun 2021, Kecamatan Sumobito memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja

dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan , meliputi :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama kecamatan Sumobito tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan Sumobito.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Sumobito Tahun 2021

NO	Indikator Sasaran Kecamatan Sumobito	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP	70.01	71.60	102.00%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80.00	84.00	114.40 %
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.29	2.34	71.12%
4	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100 %
5	Persentase pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100 %
6	Persentase evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100 %

Tabel diatas menunjukkan bahwa salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) telah Melampaui target adalah Nilai SAKIP dan IKM, untuk yang mencapai target 100% yaitu Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait, Persentase pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu, Persentase evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu, untuk IPP belum mencapai target karena beberapa faktor, kedepan akan kami tingkatkan lagi sehingga target terpenuhi.

Dengan pencapaian ini Kecamatan Sumobito tetap mengusahakan adanya peningkatan di tahun-tahun berikutnya dengan berlandaskan pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Sumobito Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	- Nilai SAKIP (102%) - IKM (114.4%)
2.	Sesuai target	- Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait - Persentase pertanggungjawaban realisasi APBDesa tepat waktu - Persentase evaluasi raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa tepat waktu
3.	Tidak mencapai target	- IPP (71,40 %)

Meskipun secara indikator umum memenuhi target, sehingga secara individu dan kegiatan Sebagian besar telah memenuhi target, berikut disajikan Capaian Kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparat	Persentase rata-rata capaian kinerja aparat	100%	99,82%	99,82%
2	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
3	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
4	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
5	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
6	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Sumobito yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%
7	3. Koordinasi dan	Terlaksananya koordinasi dan	Jumlah dokumen laporan	1 dokumen	1 dokumen	100%

	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	keuangan tahunan SKPD			
8	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
9	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	2 jenis	2 jenis	100%
10	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	2 jenis	2 jenis	100%
11	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	11 bulan	11 bulan	100%
12	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	4 buku	4 buku	100%
13			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	8932 lembar	8932 lembar	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
14	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	100%
15	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
16	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 gedung	1 gedung	100%

	Lainnya					
17	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	11 unit	11 unit	100%
18	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
19	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%
20	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	5 jenis	100%
21	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
22	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	4 unit	100%
23			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	6 unit	6 unit	100%
24	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Sumobito yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%

25	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Saranadan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	15 unit	15 unit	100%
26	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	62,50	80.90	129,44%
27	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
28	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
29			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
30	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
31	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
32	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%

33	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
34	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%
35	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
36	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
37			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
38	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 dokumen	42 dokumen	100%

39	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	42 laporan	42 laporan	100%
40	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
41			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	42 lembaga	42 lembaga	100%
42	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	42 dokumen	42 dokumen	100%
43			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	42 lembaga	42 lembaga	100%
44	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	42 dokumen	42 dokumen	100%
45			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	21 BUMDes	21 BUMDes	100%
46			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	21 TP-PKK	21 TP-PKK	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumobito.

2. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Sumobito.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa secara umum capaian

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2019	2020	2021
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	70.01	60,03	64,95	71,27
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Sumobito	94,75	N/A	94,74	89,83
	IPP Kecamatan Sumobito	3,29	N/A	3,24	2,34
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	N/A	N/A	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%

indikator kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) tahun tidak dapat diidentifikasi karena Indikator Kinerja Utama (IKU) sejak tahun 2019 s/d 2021 tidak dapat diukur karena berbeda target dan indikator.

untuk analisis pencapaian pengukuran kinerja masing-masing kegiatan selama tahun 2019,2020,2021 adalah sebagai berikut :

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	73,5	72,92	99,21%
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Sumobito	90	89,83	99,81%
	IPP Kecamatan Sumobito	3,6	3,438	95,5%
	Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN				90,83

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 99,21%, target periode akhir renstra 73,5 pada tahun 2021 telah tercapai 71,6.
2. IKM Kecamatan Sumobito telah mencapai tingkat kemajuan 99,81% target periode akhir renstra 86 pada tahun 2021 telah tercapai 84,00
3. IPP Kecamatan Sumobito belum tercapai target periode akhir renstra 3,29 pada tahun 2021 telah tercapai 2,438
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2021 target sasaran strategis Kecamatan Sumobito dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 102,26% dengan kata lain kinerja kecamatan dapat mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai IKM Kecamatan Sumobito tidak mencapai target yang ditetapkan karena terkait unsur penilaian IKM berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik unsur penilaian sarana dan prasarana dan kompetensi petugas perlu dilakukan perbaikan.

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

- c. Dukungan dan komitmen Camat Sumobito, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Sumobito untuk mencapai tujuan organisasi.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Sumobito sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2014-2018 Kecamatan Sumobito yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Sumobito melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Sumobito langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. Efisien

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. Efektif

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Sumobito melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP	104,16	74,3	29,86
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	IKM Kecamatan Ngoro	104	100	4,00
		IPP Kecamatan Ngoro	71,60	100	-28,40
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100	100	-
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100	100	-
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100	100	-
TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA			26	74,9	27,36

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni **Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumobito**, Kecamatan Sumobito menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Anggaran Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	%
1	2	3	4	5	6	7
Program Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan	76 (Baik)	70.790.000	66.935.000	Cukup Menunjang	95
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Ketentraman dan Ketertiban umum	8 Komponen	5.550.000	4.725.000	Kurang Menunjang	85
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa	11 Komponen	43.050.000	40.120.000	Cukup Menunjang	93
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Sosial Budaya	16 Komponen	4.200.000	4.200.000	Kurang Menunjang	100
Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa.	Jumlah Komponen Sinergitas Bidang Pemerintahan Umum dan Desa	22 Komponen	17.980.000	17.890.000	Cukup Menunjang	99

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.	100%	189.283.766	175.804.307	Kurang Menunjang	93
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	20 Jenis Kegiatan	189.283.766	175.804.307	Kurang Menunjang	93
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan.	100%	279.579.073	249.982.591,11	Cukup Menunjang	89
Pembangunan gedung kantor	Luas gedung kantor yang dibangun	2 m ²	211.005.658,11	183.764.422,11	Sangat Menunjang	87
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	34 Unit	47.317.000	45.770.000	Sangat Menunjang	97
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat/ gedung kantor/ bangunan pendukungnya.	Jumlah gedung kantor/ bangunan pendukung yang dipelihara	2490 m ²	15.546.415	15.406.000	Cukup Menunjang	99
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	5 Unit	1.950.000	1.946.170	Kurang Menunjang	100
Pemeliharaan rutin/ berkala/ sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	1 Unit	3.760.000	3.095.999	Kurang Menunjang	82
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	Jumlah pengadaan pakaian olahraga dan PDH	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan ang disusun sesuai auran.	100%	7.602.700	5.328.200	Kurang Menunjang	70

Penyusunan Rencana Strategis OPD	Jumlah dokumen Renstra OPD Kecamatan Sumobito yang tersusun	2 Dokumen	4.102.200	2.962.000		72
Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen rencana kerja OPD Kecamatan Sumobito yang tersusun.	2 Dokumen	2.000.500	1.000.000	Kurang Menunjang	50
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja OP	Jumlah dokumen LAKIP OPD Kec.Sumobito yang tersusun.	2 Dokumen	1.350.000	1.216.200	Menunjang	90
Penyusunan Laporan Keuangan OP	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan OPD Kecamatan Sumobito.	2 Dokumen	150.000	150.000	Kurang Menunjang	100
JUMLAH			547.255.539	498.050.098		91

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Sumobito Tahun 2021, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 4 Program dan 20 kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2021 ini Kecamatan Sumobito mendapatkan anggaran sebesar Rp.547.255.539 dengan realisasi anggaran mencapai Rp.498.050.098 atau serapan dana APBD mencapai 91% sehingga dapat diketahui pada tahun 2021 kondisi anggaran silpa Rp. 49.205.441.

Tabel 3.11
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Sumobito Tahun 2019

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI	%
1.	Hampir Memenuhi Target.	1	99,25	498.050.098	91

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) sudah efektif

BAB IV

PENUTUP

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya kecamatan Sumobito berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023 Kecamatan Sumobito.

Laporan kinerja Kecamatan Sumobito Tahun 2019 memaparkan keberhasilan serta Analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2019. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator Kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Sumobito.

Selama tahun 2019 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sumobito secara keseluruhan dan IKU yang kedua meningkatnya Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Sumobito, belum tercapai pencapaian kinerjanya dengan baik yakni 90% dikarenakan hal kesalahan Pengukuran Target yang sudah kami sampaikan di BAB/Sun BAB sebelumnya.

Meski demikian pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanismen yang baik, mulai dari perencanaan , pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang dicapai terbukti dengan pencapaian per kegiatan yang sudah Sebagian besar memenuhi/melampaui target. Dan sesuai dengan periodesasi Renstra yang dimulai pada pada Tahun 2019 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode Renstra 2018-2023.

Beberapa Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Sumobito unuk lebih meningkatkan kinerja adalah :

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai instansi terkait dalam pencapaian kinerja terutama dalam

penetapan Target Indikator Kinerja utama (IKU) antara BAPPEDA dan Bagian Administrasi Pemerintahan dalam Penetapan Target dan nilai Sinergitas yang masih belum sesuai pada Tahun 2019.

2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra kecamatan Sumobito Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan kecamatan Sumobito tahun 2019 dapat dipenuhi sesuai harapan, namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Kabupaten Jombang yaitu Berkarakter dan Berdaya saing.

Dengan tersusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumobito diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Sumobito kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

CAMAT SUMOBITO,

MUSTAGFIRIN, A.P.

Pembina Tk. I

NIP. 19740430 199311 1 001